



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : Eki Setiyo Wardani  
NIK : 3507195702730001  
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Kerja : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
Sub Unit Kerja : BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN  
UMBI MALANG  
Jabatan : BENDAHARA PENERIMA  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 3 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Eki Setiyo Wardani
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 173528

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 365.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/90 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 135 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 70 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 86.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 2.150.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 94.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 547.150.000**III. HUTANG** Rp. 19.800.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 527.350.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.